

PERINGATAN DINI BENCANA KRISIS SOSIAL EKOLOGI 2024

**Narasi Tanding Sistem Pemilu Dengan Analisa Tumpukan Janji
dan Utang Krisis Sosial Ekologis Menyejarah Di Tubuh Indonesia**



I. Bagaimana Tunggakan Utang Sosial & Ekologis Terus Tumbuh Secara Berkelanjutan

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 hanya akan menjadi kesempatan kembali bagi para kandidat untuk menumpuk utang sosial ekologis negara kepada rakyatnya. Warisan dan tumpukan masalah ini akan menjadi bom waktu di masa depan, selain itu para pasangan calon presiden dan wakil presiden ini pun masih ditunggangi oleh oligarki pelaku bisnis ekstraktif.

Ketiganya mengusung solusi palsu krisis iklim yang dibalut dengan istilah ekonomi hijau yakni transisi energi dan hilirisasi industri yang hanya akan memperkuat mesin industri ekstraktif skala raksasa, namun dibaliknya menyembunyikan rekam jejak kejahatan sosial ekologis yang panjang dan berdarah. Hasil dari Pemilu 2024 hanya akan menjadi bencana yang siap meledak karena terus berlangsungnya dehumanisasi, penyusutan ruang hidup, memicu konflik, degradasi kualitas hidup hingga pelenyapan generasi.

Penelusuran terhadap ketiga pasangan calon juga ditemukan bahwa ketiganya dihuni dan disokong oleh para pelaku bisnis dan oligarki ekstraktif baik pada tim kampanye dan tim sukses di tingkat nasional hingga ke daerah seperti di Kalimantan Timur. Tambang telah menunggangi pemilu 2024, mulai dari tambang resmi hingga tambang ilegal, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Pemilu 2024 telah mengundang transaksi mencurigakan dari tambang ilegal yang melibatkan mulai dari kandidat, timses hingga partai politik.

Dari Pemilu ke Pemilu tidak pernah ada evaluasi kinerja dan penyelesaian daftar warisan masalah terdahulu oleh rezim baru, namun justru sibuk menambah janji-janji kosong dan mimpi indah yang tak ada urusannya dengan persoalan yang dihadapi rakyat, hal ini terlihat melalui beberapa pola sepanjang lima Pemilu yang digelar sejak pasca reformasi khususnya mulai dari Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024, yang jika dievaluasi kelima Pemilu dalam kurun 20 tahun terakhir telah menghabiskan dana sebanyak 144 triliun rupiah, akan tetapi nampak terlihat bahwa Pemilu hanyalah sekedar ;

Tumpukan janji baru para pasangan calon yang akan menggunung dan menjadi bom waktu di masa depan

Janji dan program yang diumbar adalah janji yang membangkrutkan bentang sosial dan ekologis Indonesia

Pasangan pemenang Pemilu bahkan tidak melunasi janji dan menyelesaikan hutang sosial ekologis saat mereka berkuasa namun justru mengeluarkan kebijakan dan program yang kontroversial

Dari penelusuran ketiga pasangan calon, seluruhnya juga dihuni dan disokong oleh para pelaku bisnis dan oligarki ekstraktif yang menjuntai hingga timses dari tingkat nasional sampai ke daerah seperti di Kalimantan Timur

Penjabaran keempat pola tersebut dapat dinilai melalui hal berikut ini ;

a. Menggunungnya Tumpukan Janji Baru Yang Akan Menjadi Bom Waktu

Tidak hanya janji lama oleh para calon yang tidak pernah ditunaikan, para calon yang baru kembali mengumbar janji yang akan menumpuk dan menjadi bom waktu, diantaranya adalah janji yang kembali diumbar oleh pasangan Prabowo-Gibran yang pada pemilu 2024-2029, mereka menjanjikan jaminan pelestarian lingkungan hidup, percepatan pencapaian target Net Zero Emission, mengupayakan penurunan jejak karbon dan jejak air untuk berbagai produk, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari, mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru, kemudian memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya.

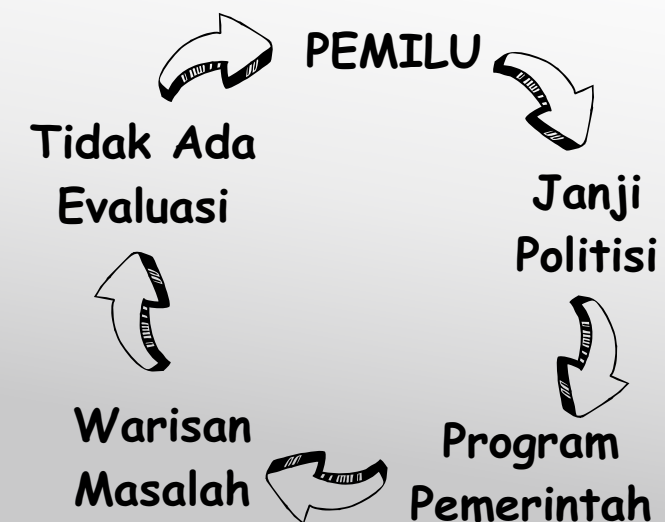
Para calon yang baru pada pemilu 2024-2029 lainnya seperti Anies-Muhaimin juga menambah 'gunung' tumpukan janji yakni keinginan untuk penguatan tata kelola lingkungan hidup, pemanfaatan energi baru terbarukan, mengembangkan ekonomi hijau, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, penanganan polusi udara, air, dan sampah, memperbaiki hutan dan keanekaragaman hayati, hingga janji untuk membangun ketahanan terhadap bencana alam, dan mendorong kolaborasi pemangku kepentingan lingkungan.

Para calon yang lain yakni pasangan Ganjar-Mahfud ikut mengumbar janji tentang penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penguatan mitigasi dan penanganan perubahan iklim serta bencana, perlindungan dan konservasi lingkungan laut, percepatan secara konsisten transisi energi terbarukan, percepatan pengelolaan air dan sumber daya air secara berkelanjutan hingga janji penguatan ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Ketiga pasangan calon yang berada di atas panggung Pemilu 2024, nampak selalu mengumbar janji tentang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, bahkan pasangan calon Prabowo-Gibran berambisi menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau di dunia yang merupakan bagian dari solusi palsu dalam mengatasi laju krisis iklim global.

Menggunungnya tumpukan janji baru ini terjadi karena tidak pernah ada evaluasi kinerja dan warisan masalah rezim terdahulu oleh rezim baru, sebaliknya rezim baru justru sibuk dengan janji-janji baru dan mimpi indah yang tak ada urusannya dengan isu dan persoalan yang dihadapi rakyat, kesemua warisan masalah rezim terdahulu menumpuk dan menjadi bom waktu di masa depan yang tidak siap direspon.

Tunggakan Janji & Utang Sosial Ekologis Terus Tumbuh dan Berkelanjutan



b. Janji dan program yang diumbar membangkrutkan bentang sosial dan ekologis

Keseluruhan para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden setiap Pemilu nampak mengulang-ulang janji mengejar target pertumbuhan ekonomi sebagai janji program mereka seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% sampai dengan akhir 2014 yang disampaikan oleh pasangan SBY-Boediono pada pemilu 2009-2014, lalu pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla juga pernah menjanjikan akan membawa ekonomi Indonesia melambung tinggi ke level 7%.

Sementara Prabowo Subianto selalu menjanjikan target pertumbuhan ekonomi mulai dari 6,5 hingga 7% pada saat dua Pemilu terakhir, yakni pada Pemilu 2014-2019 dan Pemilu 2019-2024, baik ketika ia berpasangan dengan Hatta Rajasa maupun Sandiaga Uno.

Pertumbuhan ekonomi dan paradigma ekonomi menetes (trickle down effect) yang selama ini dijadikan acuan hanya akan memperkuat mesin industri skala raksasa yang menyebabkan perombakan pola produksi dan konsumsi rakyat, mengubah pemilik menjadi buruh dan terus melanggengkan pengerukan kekayaan alam, muaranya berujung pada penyusutan ruang hidup, degradasi kualitas hidup, dehumanisasi, konflik dan pelenyapan generasi.

Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh para calon tersebut masih bersandar pada ekonomi berbasis ekstraktif (tebang, gali dan keruk sumber daya alam) contohnya adalah umbaran janji dari pasangan calon Jusuf Kalla dan Wiranto pada Pemilu 2009-2014 yang dalam visi-misinya ingin memanfaatkan sumber energi yang diklaim merupakan sumber energi yang dapat diperbarui seperti panas bumi dengan kapasitas 10.000 MW dan energi nabati yang keduanya sesungguhnya amat rakus lahan, rakus air dan memiliki daya rusak tinggi atas nama mencukupi kebutuhan energi nasional.

Penambangan panas bumi di pulau Flores adalah salah satu buktinya, di Mataloko dan Ulumbu, operasinya menyebabkan seng atap rumah, sekolah-sekolah berkarat dan rusak dalam waktu singkat karena uap dari tambang panas bumi yang korosif. Lalu disusul oleh kopi, cengkeh dan vanili milik warga Ulumbu gagal panen, luapan lumpur berhawa panas menutupi sawah-sawah warga di Mataloko. Obsesi menguras energi yang diklaim sebagai energi bersih, baru dan terbarukan ini telah membuat seluruh Pulau Flores dikapling dan

dijadikan Pulau Energi Panas Bumi secara sepihak oleh Presiden Jokowi melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (menteri ESDM RI) dengan nomor 2268 K/30/MEM/2017 pada tanggal 19 Juni 2017, tanpa konsultasi dan partisipasi warganya.

Begitu juga janji pasangan calon Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014-2019 yang menyampaikan akan mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit, dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial yang sesungguhnya merupakan mitos belaka. Berbagai tumpukan janji yang membangkrutkan itu lalu disempurnakan dengan visi-misi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019-2024 dengan jalan mengundang investasi seluas-luasnya dengan cara mempercepat proses perijinan dan menghilangkan hambatan-hambatan investasi, yang keseluruhannya untuk meraih angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

Penyusutan Ruang Hidup

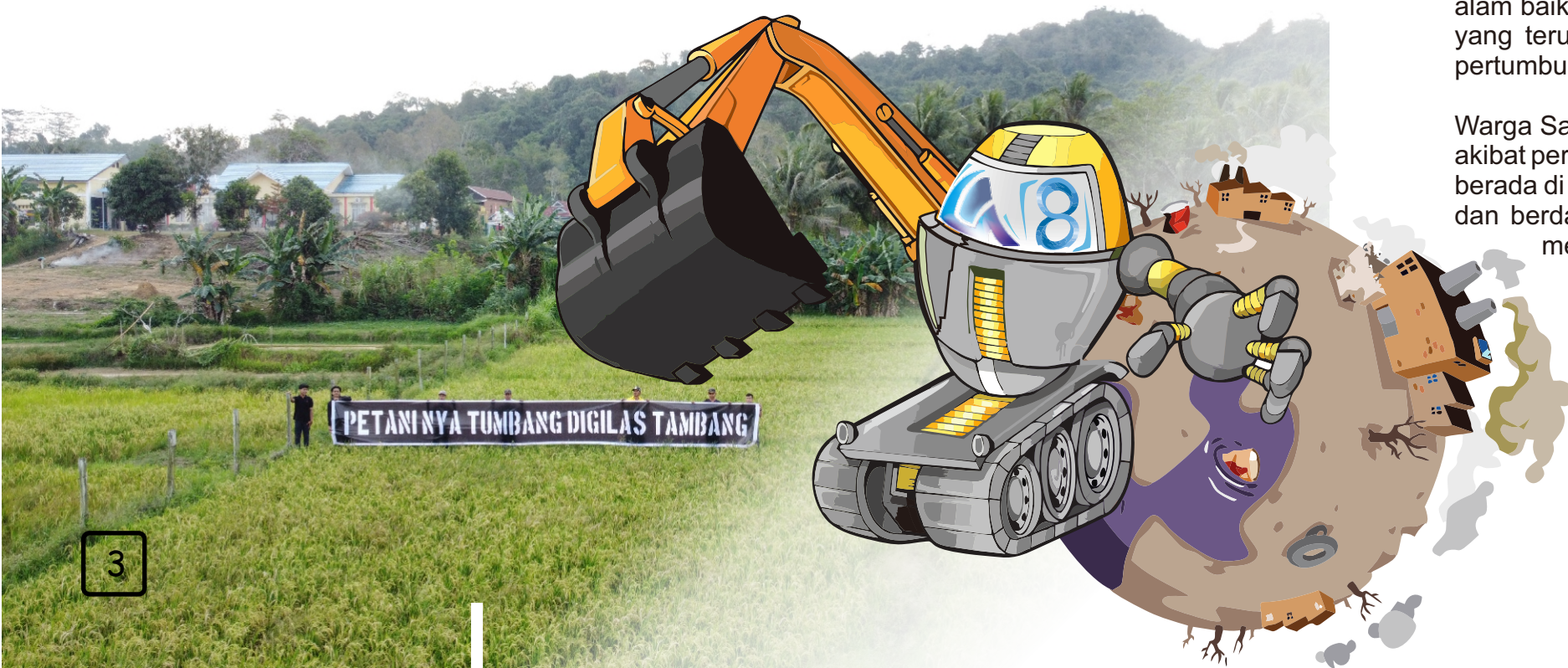
Dari Pemilu ke Pemilu seperti yang diurai diatas ternyata tidak mengatasi laju penyusutan ruang hidup, sebaliknya izin-izin tambang yang merampas ruang hidup rakyat justru bertambah luas, pada saat setelah pemilu, JATAM menemukan pada tahun politik 2017 terdapat 172 izin tambang yang terbit pada periode Januari 2017 hingga Januari 2018 atau setahun sebelum Pilkada 2018 dan menjelang Pemilu 2019 berlangsung.

Begitu juga yang terjadi di tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara misalnya, pada 2009 mengeluarkan 93 izin usaha pertambangan (IUP). Pada 2010, tahun saat kabupaten itu melaksanakan pilkada, ada 191 IUP yang baru dikeluarkan Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kali lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Sementara pada Provinsi Kalimantan Timur pada 2008, terdapat 589 izin kemudian meningkat menjadi 1.180 izin setelah Pilkada usai. Lalu pada Pilkada Kaltim 2013, izin juga meningkat dari 1.271 menjadi 1.433 izin setelah Pilkada selesai.

Dari Pemilu ke Pemilu kekayaan alam terus dibongkar demi kepentingan bisnis para pelaku pesta demokrasi lima tahunan ini dan dilakukan untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha berbasis lahan skala besar. Teranyar disampaikan juga para calon kandidat presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang akan terus membongkar kekayaan alam baik tambang mineral, batubara, panas bumi, bauksit, hingga hilirisasi pertambangan yang terus digaungkan dan menjadikan rakyat sebagai tumbal kegiatan ekstraktif demi pertumbuhan ekonomi.

Warga Sanga Sanga di Kalimantan Timur mengalami penyusutan ruang dan kualitas hidup akibat pertambangan batubara PT Adimitra Baratama Nusantara (PTABN), masyarakat yang berada di Kelurahan Jawa semakin sering mengalami peristiwa banjir sejak tahun 2019 dan berdampak pada tiga RT, yaitu RT 02, RT 05 dan RT 08, dengan ketinggian banjir mencapai setinggi paha orang dewasa, salah satu penyebab sering terjadinya banjir akibat dari peran perusahaan PT ABN yang membuang limbah batubaranya lewat drainase warga yang berada di tengah pemukiman lalu menuju sungai sanga-sanga. Selain banjir, warga yang berada di RT 03 Kelurahan Jawa juga mengalami kekeringan di 6 titik sumur yang sudah puluhan tahun mereka gunakan sebagai sumber air utama di lereng pegunungan yang kini mengering akibat aktivitas penambangan yang semakin dekat dengan pemukiman dan pembukaan pit baru yang hanya berjarak 200 meter dari sumur-sumur warga tersebut.



Selain air, kondisi udara di kelurahan Jawa juga semakin buruk, kualitas udara yang semakin buruk ini dibuktikan dengan dua warga RT 02 dan RT 03 harus rutin berobat ke pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) akibat pernapasannya terganggu, padahal sebelumnya warga tersebut tidak memiliki riwayat penyakit gangguan pernapasan. Begitu juga dengan lahan perkebunan dan tanaman buah milik warga mengalami kerusakan dan penurunan hasil panen akibat debu-debu tambang dan kualitas kesuburan tanah yang semakin menurun. Peristiwa penurunan hasil panen ini dialami warga mulai sejak tahun 2013 lalu dan secara terpaksa warga harus menjual tanahnya ke perusahaan dan mencari tempat bertani yang baru, para warga yang masih tetap bertahan juga diperhadapkan dengan hama monyet yang selalu mengganggu dan memakan tanaman buah milik warga.

Menciptakan Konflik dan Dehumanisasi

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu hektar, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah kasus konflik agraria pada 2023 meningkat dibanding 2022.

KPA mencatat, kasus konflik agraria pada 2023 banyak terkait sektor usaha perkebunan (108 kasus), bisnis properti (44 kasus), pertambangan (32 kasus), dan proyek infrastruktur (30 kasus). Ada pula letusan konflik terkait sektor kehutanan (17 kasus), pesisir dan pulau kecil (5 kasus), serta fasilitas militer (5 kasus).

Jika dirinci lagi, sektor infrastruktur dengan area konflik terbesar adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rincian luas area konflik agraria sektor infrastruktur pada 2023 berdasarkan jenis proyeknya:

IKN: 235.751 hektare
Bandara: 4.162 hektare
Pembangkit listrik: 1.585 hektare
Bendungan: 1.027 hektare
Jalan tol: 693 hektare
Kereta api: 300 hektare
Fasilitas umum: 106 hektare
Jalan umum: 62 hektare
Pelabuhan: 56 hektare
Daerah aliran sungai: 15 hektare

Selama periode 2009—2022, setidaknya ada 4.107 kasus konflik agraria di Indonesia, dengan total luas area konflik 11,8 juta hektare. Databoks menghimpun angka ini dari rangkaian laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang rutin mereka rilis sejak 2009.

Berdasar metode tersebut, sepanjang 2009—2022 konflik agraria paling banyak tercatat pada era pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu 659 kasus pada 2017.

Menurut KPA, mayoritas kasus konflik agraria pada 2017 terkait dengan sektor perkebunan, terutama untuk komoditas kelapa sawit.

Di sisi lain, jika dilihat dari luasan area konflik, kasus agraria paling besar terjadi pada akhir era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada 2014.

Dari 472 kasus konflik agraria yang mencuat pada tahun tersebut, total luas lahan yang diperebutkan mencapai 2,86 juta hektare.

Mayoritas area konflik pada 2014 terkait sektor perairan dan kelautan (54%), khususnya perebutan wilayah konsesi migas serta perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Menurut KPA, kasus konflik agraria pada 2014 juga banyak terkait sektor perkebunan, serta proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur.



Penyusutan, degradasi dan dehumanisasi pada ruang hidup semakin meningkat karena berbagai program penambangan nikel dan hilirisasi tambang, tidak ada pulau yang terlalu besar ataupun kecil untuk dirusak oleh berbagai proyek yang dikemas sebagai Proyek Strategis Nasional ini. Dari penelusuran terdapat 55 pulau kecil yang telah dikapling pertambangan dan jenis tambang yang paling banyak adalah nikel, yang berada di 29 pulau. Kesemua ini dipicu oleh kebijakan Presiden Jokowi pasca Pemilu 2019 melalui diterbitkannya Perpres No 55/2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Beberapa diantara gambaran pulau kecil yang telah hancur akibat pertambangan nikel dapat dilihat di Pulau Kawe & Pulau Gag, di Papua Barat dan Pulau Gebe, Maluku Utara

Borok dibalik Industri Hilirisasi

Para pasangan calon pada Pemilu 2024-2029 kembali mengusung janji dan program hilirisasi yang membangkrutkan ini dengan dikemas sebagai bagian dari ekonomi hijau dan skenario transisi energi di Indonesia, salah satunya adalah pasangan calon Prabowo-Gibran yang akan menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau di dunia. Namun, dibalik ambisi tersebut menyembunyikan borok seperti yang terjadi di kompleks penambangan dan industri hilirisasi nikel di Indonesia Weda Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara yang menyebabkan serangkaian kerusakan seperti pengalihan Sungai Ake Sake dan privatisasi air Sungai Kobe disana, operasinya juga rakus penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pabrik hidrometalurgi di kompleks industri itu.

Di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Kawasan Industri Hijau yang diklaim terbesar di dunia seluas lebih dari 16.400 hektar telah menyebabkan kawasan perikanan drastis menyusut hingga 5 kali lipat, kawasan wisata pantai yang diantaranya juga berada di Tanjung Palas Timur ikut menciut 17 kali lipat dari semula.

Belum lagi tumpang tindih kawasan budidaya air payau, jalur migrasi paus dan penyu, kawasan pertanian, kawasan peruntukan lahan pangan, pertanian berkelanjutan bahkan hingga kawasan pemukiman pedesaan seperti yang dialami oleh Kampung Baru di Desa Mangkupadi yang sedang menghitung hari untuk digusur paksa demi pembangunan berbagai tapak proyek hilirisasi dan energi bersih. Mulai dari pabrik dan smelter untuk aluminium, polysilicon, steel, lithium-ion battery hingga petrochemicals.

Sementara itu proyek hilirisasi nikel menjadi feronikel juga ditemukan di Kalimantan Timur sendiri, yakni di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga. Sejak awal rencana pendirian Pabrik nikel PT Kalimantan Ferro



Industry (KFI) tersebut masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup untuk dapat menentukan apakah mereka setuju dan menerima akan adanya pembangunan pabrik tersebut, smelter ini dibangun tanpa AMDAL dan limbah dibuang begitu saja ke parit warga dan sungai sekitar.

Proyek ini telah memakan korban pada bulan Juli 2023 kecelakaan kerja yang mengakibatkan satu pekerja tewas akibat terjatuh dari ketinggian 30 Meter diduga karena fasilitas penunjang keselamatan kerja yang sangat minim, dan pada bulan Oktober 2023 Smelter yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor tersebut meledak dan menyebabkan 2 pekerja asing asal China tewas.

Pemilik Menjadi Buruh di tanah sendiri

Akibat terus bergantinya pada ekstraktivisme terjadi perombakan pola produksi dan konsumsi warga, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, luas perkebunan kelapa mencapai 11.344 hektar, Desa Santan adalah salah satu dari produsen utama komoditas kelapa tersebut, kini selain menghadapi lahan produksi kelapa yang menyusut tersebut akibat tambang para pemilik lahan dan kelapa kini terpaksa berubah menjadi buruh dan karyawan tambang PT Indominco Mandiri disana.

Ekstraktivisme hijau lewat hilirisasi batubara yang direncanakan untuk memproduksi Metanol dan Amonia di Bengalon, Kalimantan Timur oleh kongsi Tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan Kawasan Industri Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) terekam membuat 13 keluarga menjadi korban gusur paksa dalam upaya perluasan bagian dari 1.000 hektar rencana tapak kompleks industri BCIP pada sepanjang Mei 2021. Di hulunya, akibat pengerukan batu bara bahkan profesi dan pekerjaan warga yang mengandalkan kondisi alam sebagai sumber mata pencaharian yakni sebagai petani pisang dan pemburu madu di Desa Tebangan Lembak kini mulai punah.



Foto pembangunan kawasan Industri Batuta Chemical Industrial Park (BCIP)

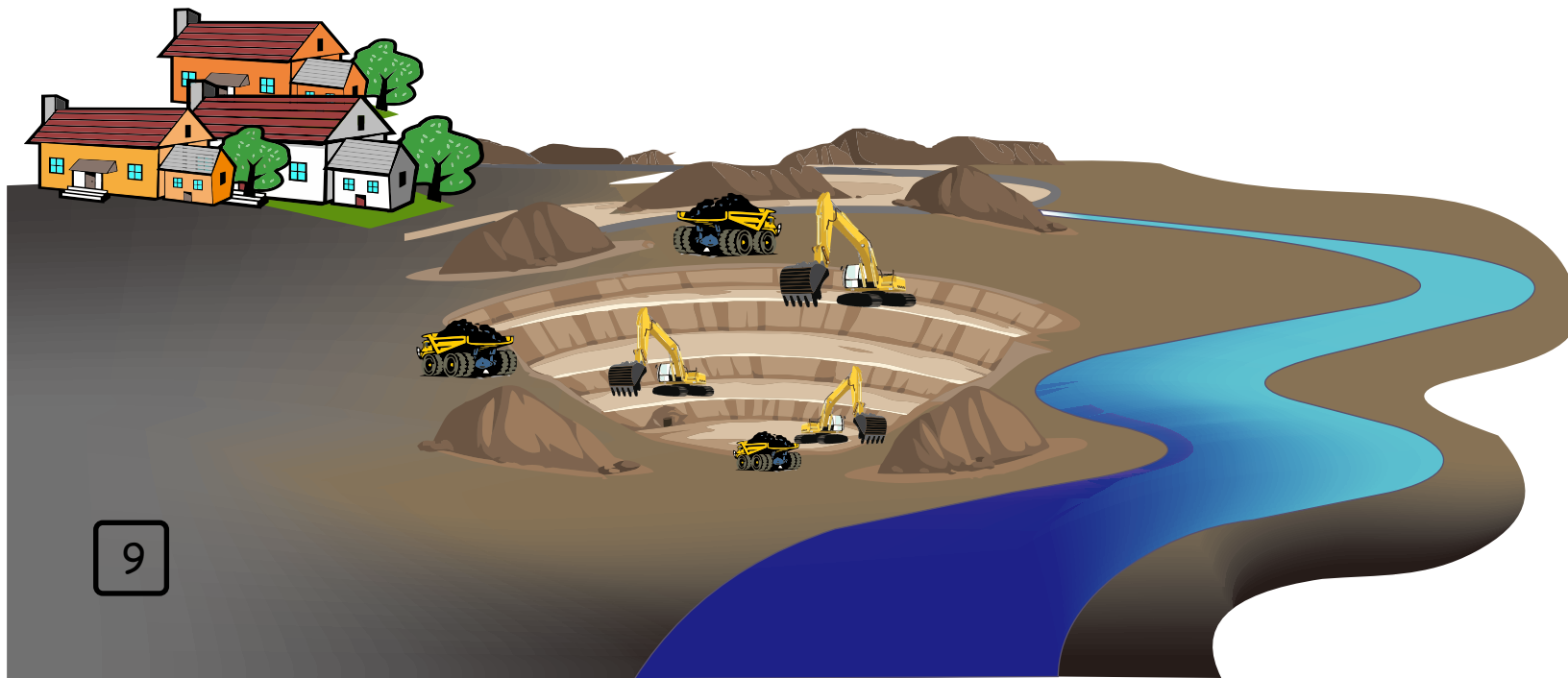
C. Pasangan pemenang Pemilu bahkan tidak melunasi janji dan utang sosial ekologis saat berkuasa namun justru mengeluarkan kebijakan dan program yang kontroversial

Seperti ketika Megawati–Presiden yang menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid–berkuasa pada tahun 2002 hingga 2004. Pada masa jabatan kepemimpinannya, berbagai kebijakan kontroversial dikeluarkan dan merugikan hingga hari ini, misalnya mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mempermudah alih fungsi kawasan dan memberikan keuntungan bagi industri tambang dengan mengeluarkan pengecualian terhadap 13 perusahaan pertambangan, salah satunya adalah PT Indominco Mandiri yang menambang di wilayah Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Selain itu juga di kawasan hutan lindung lainnya, ia bahkan “menjual” Gas Blok Tangguh dengan Harga Murah.

Begitu juga obral janji pada Pemilu 2004-2009 oleh Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang kala itu menyampaikan janji penciptaan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup. Bahkan juga pada pemilu 2009-2014, pasangan SBY-Boediono kembali menumpuk janji perbaikan lingkungan hidup dan menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia.

Namun ketika pasangan SBY-JK berkuasa, justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2008. PP ini mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang memungkinkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 juta - Rp 3 juta per hektar. Lebih murah lagi jika membukanya untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, instalasi teknologi energi terbarukan dan jalan tol. Tarif untuk semua itu menjadi Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. Bayangkan, hutan hanya dihargai Rp 120 – Rp 300 per meter, lebih murah dari sepotong pisang goreng.

SBY menempati urutan kedua Presiden yang terbanyak memberikan lahan kepada korporasi, setelah Soeharto yang berkuasa selama 32 Tahun dengan memberi izin seluas 78,7 juta Ha. Walau hanya berkuasa selama 10 tahun, SBY menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektare kepada korporasi. Dengan rata-rata sekitar 5,5 juta hektare lahan ia obral kepada korporasi tiap tahunnya selama 10 tahun. Rinciannya 11,9 juta hektar untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Alam, sekitar 6 juta hektar untuk PBPH Tanaman, 2,1 juta hektar kawasan hutan dilepaskan untuk perkebunan sawit, dan 35 juta hektar untuk pertambangan.



Pada masanya, bukannya memberikan sanksi terhadap perusahaan perusak lingkungan yang menyebabkan bencana lumpur Lapindo yang menenggelamkan ribuan tempat tinggal padat huni seluas 800 Ha. Dan menyebabkan 20.000 KK harus mengungsi, sebaliknya ia justru memberikan dana talangan sebagai bantuan kepada perusahaan dengan nominal lebih dari 11 triliun rupiah, yang diambil dari anggaran publik lewat APBN.

Sementara itu pasangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014-2019 menjanjikan mekanisme politik legislasi yang kuat, penegakan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Janji lainnya adalah perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum dengan obral komitmen untuk memperkuat lembaga KPK, serta memberantas mafia peradilan. Jokowi-JK pada saat kampanye juga berjanji untuk memberantas tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar.

Tidak berhenti disitu utang janji dari Jokowi kembali diobral pada Pemilu 2019-2024, janji itu disampaikan pada saat debat masa itu, ia berjanji melakukan pemulihan, pengawasan dan menyelesaikan satu persatu masalah lubang tambang dengan cara penghutanan kembali.

Dari seluruh janji Presiden Jokowi bersama wapresnya, baik JK maupun Ma'ruf Amin semenjak Pemilu 2014-2019 hingga Pemilu 2019-2024, seluruhnya tidak pernah ditunaikan saat ia berkuasa, justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Janji penguatan legislasi berujung pada upaya melancarkan berbagai produk Undang-undang yang memperluas krisis sosial ekologis seperti revisi UU Pertambangan hingga UU Cipta Kerja. Janji penegakan Hak Asasi Manusia juga menguap, pada saat ini masyarakat makin banyak dikriminalisasi, pengusuran atas nama proyek pembangunan seperti di pegunungan Kendeng, Wadas dan Rempang hingga masyarakat adat Balik di Sepaku, Kalimantan Timur terus digusur untuk Mega Proyek Ibu Kota Baru.

Janji memperkuat KPK tidak pernah terwujud, KPK malah dilemahkan melalui Revisi Undang-undang KPK, proses seleksi pimpinan KPK yang penuh intrik hingga penempatan Komisioner KPK yang memiliki rekam jejak buruk. Janji memperkuat memberantas mafia peradilan pupus karena justru lembaga peradilan tertinggi yakni Mahkamah Konstitusi digunakan untuk melanggengkan dinasti politik keluarga Jokowi melalui Pemilu 2024.



Gambar satgas Omnibuslaw Jatam
<https://www.jatam.org/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law/>

BOX I : UTANG JANJI JOKOWI TENTANG TAMBANG ILEGAL & LUBANG TAMBANG

Janji-janji Presiden Jokowi dalam dua periode kekuasaannya pada 2014-2019 dan 2019-2024, salah satunya komitmen untuk memberantas tindakan penangkapan liar, perikanan liar (illegal fishing), dan penambangan liar tidak pernah direalisasikan, sebaliknya penambangan liar atau (illegal mining) bukan hanya terus berlangsung namun bahkan menjadi sumber pendanaan kampanye. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, adanya sumber dana kampanye berasal dari pertambangan ilegal sebesar Rp 3,7 triliun dan kasus lingkungan hidup lainnya sebesar Rp 264 miliar.

Hingga saat ini terdapat sekitar 2.700 tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah pertambangan batu bara. Ribuan tambang ilegal tersebut tersebar di 28 provinsi, sebagian di antaranya adalah Jawa Timur sebanyak 649 titik, Sumatera Selatan 562 titik, Jawa Barat 300 titik, Jambi 178 titik, Nusa Tenggara Timur 159 titik, Banten 148 titik, Kalimantan Barat 84 titik, dan lebih dari 180 titik tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Timur, bahkan termasuk wilayah yang kini dijadikan untuk Ibu Kota Negara yang baru.

Hal ini diperparah dengan permasalahan dana kampanye dalam setiap pesta elektoral yang serba tertutup dan terkesan hanya sebatas formalitas belaka untuk memenuhi persyaratan administratif Pemilu, yang terkesan “pura-pura terbuka”. Bahkan Bawaslu RI tidak dapat mengakses laporan dana kampanye. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak memberikan akses penuh kepada lembaga pengawas tersebut. Khususnya terhadap

rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan laporan awal dana kampanye (LADK) yang dilaporkan peserta Pemilu 2024.

Sepanjang 2018 hingga 2024 aktivitas penambangan tanpa izin ini terus menjadi momok bagi warga setidaknya dalam catatan Jatam Kaltim tersebar lebih dari 178 titik operasi tambang ilegal di seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan sebaran di beberapa wilayah Kabupaten Kota, dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 120 titik, Kutai Barat 2 titik, Berau 10 titik, Samarinda 32 titik dan PPU 16 titik.

Modus para penambang ilegal tidak hanya mengeruk dan merusak di wilayah yang sebenarnya berada pada wilayah konsesi sebuah perusahaan, atau wilayah yang berada di antara dua Konsesi yang biasa disebut dengan istilah Tambang Koridor, mereka juga menggarap lahan yang jelas haram adanya aktivitas penambangan seperti di wilayah Tahura Bukit Soeharto, di sekitar Waduk Samboja, tempat penampungan dan sumber air bersih bagi warga Samboja dan sekitarnya.

Tidak hanya itu kawasan pertanian, perkebunan sayur dan wisata tidak luput dari rakusnya operasi pertambangan ilegal ini, seperti di wilayah Sumber Sari dan Bukit Biru, yang selama Pandemi Covid-19 mampu menjadi kontributor beras bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, juga wisata yang menghidupi perekonomian warga yang sangat bergantung pada kelestarian alam yang mereka jaga selama ini.



Selain itu penegakan hukum yang tumpul atas tambang ilegal dikarenakan berbagai drama “Backing” tambang ilegal oleh aparat penegak hukum sendiri, salah satunya adalah kasus Ismail Bolong, yang juga menyeret seorang jenderal bintang tiga di kepolisian. Uang hasil kegiatan tambang ilegal di Kaltim senilai Rp 6 miliar diduga mengalir juga pada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, yang kemudian membuat kisruh di tubuh Kepolisian dengan label “Perang Bintang”.



Foto lokasi tambang ilegal di wilayah Desa Santan Ulu, Kukar

Mutasi dan rotasi besar-besaran terutama di tubuh Polri menjelang pemilu sebelumnya, hanya sekedar mengamankan kepentingan politik Jokowi semata⁽³⁾, alih-alih guna memaksimalkan kinerja penegak hukum, justru Jokowi hanya sekedar menggunakan Kekuasaannya untuk menjaga wilayah kekuasaannya ketimbang mengutamakan Keamanan dan Kondisi Keselamatan Masyarakat yang setiap harinya terus dihadapkan dengan ancaman Premanisme dan Pengabaian tindakan Hukum Oleh Aparat keamanan dan Juga Kriminalisasi Oleh Pihak Perusahaan.

Janji Lubang Tambang

Begitu juga dengan janji-janji untuk mengatasi dan menyelesaikan problem Lubang-lubang bekas tambang yang telah menjadi topik utama dalam isu lingkungan hidup di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, JATAM mencatat terdapat 44.736 lubang tambang batu bara yang masih menganga, berisi air beracun dan mengandung logam berat berbahaya. Korban yang sudah jatuh dari catatan JATAM Kaltim sudah mencapai 45 nyawa, mayoritas korban masih berusia anak-anak. Diperkirakan masih terdapat lebih dari 80 ribu titik lubang yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Titik-titik lubang tambang tersebut teridentifikasi berada di 40 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang 36 perusahaan tambang di 22 wilayah provinsi.

Lubang-lubang itu lebih dari separuhnya atau sekitar 55 persen dihasilkan dari aktivitas pertambangan batu bara, yakni sebanyak 50.098 titik. Lubang pertambangan nikel juga cukup banyak, yaitu sejumlah 16.705 titik.

Lima perusahaan terbanyak penghasil lubang tambang yakni, PT Kaltim Prima Coal sebanyak 43.557 titik lubang, PT Weda Bay Nickel 10.684 titik lubang, PT Borneo Indobara 4.410 titik lubang, PT Tambang Tondano Nusajaya 4.036 titik dan PT Vale Indonesia sebanyak 3.648 titik.



Player korban lubang tambang ke 45

biaya politik elektoral yang berlangsung tiap tahun bahkan juga pemilu dan pemilihan anggota legislatif, pemerintah mempermudah perizinan tersebut diikuti pula dengan ‘menyelewengkan’ makna, definisi dan terminologi dari reklamasi atas lubang-lubang tambang.

Kini meski Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri tapi ia dengan vulgar mewariskan kekuasaan politik dengan tampilnya putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon pada Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kini janji-janji sosial-ekologis yang ditelantarkan oleh rezim Jokowi akan menumpuk dan membuat gunung warisan masalah yang akan menjadi bom waktu di masa depan.

d. Rekam Jejak Ketiga Paslon Kaitannya Dengan Bisnis Ekstraktif dan Industri Hilirisasi

Ketiga pasangan calon juga dihuni dan disokong oleh para pelaku bisnis dan oligarki ekstraktif.

Dari penelusuran atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terdapat empat figur yang terhubung dengan pasangan calon Anies-

Muhaimin yang diduga terkait rekam jejaknya dengan bisnis industri ekstraktif yakni (1) Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai partai Pengusung pasangan nomor urut satu ini.

Surya Paloh terhubung dengan ‘gurita’ bisnisnya mulai dari media, properti, hotel, hingga catering, melalui PT Pangansari Utama miliknya yang menyediakan jasa boga untuk PT Freeport, tambang emas terbesar di Indonesia⁽⁴⁾. Nama Surya Paloh juga ada dibalik PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang berada di kawasan Gunung Leuser, Aceh. Ia dan oligarki partainya diduga terlilit kasus korupsi Blok Cepu dan penyalahgunaan Kredit Bank Mandiri yang berafiliasi dengan PT Cipta Graha Nusantara senilai 160 miliar rupiah⁽⁵⁾.

Berikutnya adalah (2) Sudirman Said sebagai Co-Captain 1 dalam Tim Nasional (Timnas) AMIN, ia adalah mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada periode 2014-2016, pada saat menjabat, Sudirman tercatat menandatangani izin proyek panas bumi (geothermal) di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah pada 2016. Pengeboran PT Sejahtera Alam Energi (SAE) ini mengakibatkan pencemaran Sungai Prukut, sumber air warga, hingga para petani sekitar mengalami penurunan panen⁽⁶⁾.

Kemudian (3) Ahmad Ali yang menjabat sebagai Kepala Pelatih Tim Nasional (Timnas) AMIN, ia juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Pada rekam jejak yang ditelusuri, ia terhubung dengan PT Graha Mining Utama yang memiliki lahan tambang nikel di Sulawesi Tengah seluas 624,53 hektar⁽⁷⁾.

Paslon 01, ini juga didukung oleh (4) Jusuf Kalla, politisi senior Partai Golkar dan Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12. Pada rekam jejak yang ditelusuri ia terhubung dengan bisnis pertambangan, salah satunya PT Malea Energy yang beroperasi di Desa Rano Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan⁽⁸⁾.

Perusahaan ini terungkap merampas lahan adat atau tongkonan dan mendapat proper merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena diduga tidak mengindahkan kriteria lingkungan, baik pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, sampai pengendalian kerusakan lahan⁽⁹⁾.

Perusahaan Kalla Group lainnya yakni PT Poso Energy juga menenggelamkan lahan pertanian masyarakat di pesisir Danau Poso dan pelanggaran HAM di Desa Pamona di Sulawesi Tengah⁽¹⁰⁾.

Sementara dari Penelusuran atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terdapat tujuh figur yang diduga terkait rekam jejaknya dengan bisnis industri ekstraktif, selain itu Prabowo sendiri juga terhubung dengan bisnis Group Nusantara. Hingga Februari 2019, Group Nusantara setidaknya menguasai lahan batu bara seluas 62.753 ha di Kalimantan Timur melalui sejumlah anak usahanya yakni PT Tambang Berau Coal, PT Kaltim Nusantara Coal dan PT Nusantara Santan Coal⁽¹¹⁾.

Begitu juga pasangannya Gibran Rakabuming Raka yang terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera yang memiliki keterkaitan dengan PT. Toba Bara Sejahtra milik Luhut Binsar Panjaitan, bisnis ini meliputi berbagai sektor ekstraksi, seperti migas, batu bara, PLTU dan perkebunan kelapa sawit skala besar, yang daya rusaknya membentang di Kalimantan Timur, dari Kecamatan Sanga-Sanga hingga Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara⁽¹²⁾.

Ketujuh figur lainnya adalah (1) Hashim Djojohadikusumo, ia adalah adik dari Prabowo Subianto, dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah, rekam jejak Hashim terbentang dan terkait dengan PT Arsari Group. Salah satu perusahaan



yang paling diuntungkan dalam mega proyek ibu kota baru Indonesia, Jika dilihat dari ring satu dan ring dua IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hashim Djojohadikusumo.

Hashim juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. ITCI KU) yang diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 173.395 hektar, tepat berada di ring dua IKN. Lewat perusahaannya tersebut dan ditambah dengan hadirnya proyek ibu kota baru, rekam jejak hutang sosial ekologis Hashim jelas terlihat, mulai dari pengrusakan hutan, pencemaran, perampasan lahan, kriminalisasi hingga menggusur masyarakat adat balik di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara⁽¹³⁾.

Figur berikutnya adalah (2) Airlangga Hartarto, ia Ketua Umum Partai Golkar, di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) menjabat sebagai Pembina, ia terhubung dengan dua perusahaan batubara, yakni PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama (MHU) di Tenggarong Kalimantan Timur. Lalu pada 16 Desember 2015, salah satu lubang tambang PT MHU telah merenggut nyawa Mulyadi (15), seorang pelajar SMK Geologi Pertambangan, warga Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, perusahaan ini juga menghilangkan sumber air dan menyebabkan warga di Desa Loa Ipuh Darat mengeluh soal kesehatan, infeksi saluran pernafasan dan gangguan pencernaan⁽¹⁴⁾.

Figur lainnya adalah (3) Zulkifli Hasan, sebagai wakil ketua pengarah TKN Prabowo-Gibran, Zulkifli menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan pada era presiden SBY. Pada saat itu, Zulkifli mengeluarkan Surat Keputusan penurunan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas atas pengajuan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Usulan pelepasan status kawasan seluas 9.743,28 hektar itu dikabulkan Zulkifli sebanyak 1.942 ha di wilayah Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Penyetujuan pelepasan kawasan hutan itu menjadi salah satu cikal bakal aktivitas tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang komposisi kepemilikan sahamnya terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group⁽¹⁵⁾.

Figur selanjutnya adalah (4) Aburizal Bakrie, politisi senior partai Golongan Karya, sebagai salah satu Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, ia juga pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Bisnis yang dijalankan Grup Bakrie meliputi bisnis pertambangan energi, infrastruktur, keuangan, kesehatan, media, hingga perkebunan. Bisnis pertambangan milik grup Bakrie yang dijalankan oleh PT Bumi Resources Tbk adalah PT Kaltim Prima Coal (PT KPC), salah satu anak perusahaan Bumi Resources, yang beroperasi di Kutai Timur, memiliki rekam jejak daya rusak sosial ekologis yang menyebar disana.

Mulai dari pencemaran sungai Sangatta dan Bengalon yang meluas hingga pesisir Kenyamukan dan Sekerat. Tindak kekerasan dan pelanggaran HAM serta perampasan tanah juga dilakukan oleh PT KPC terhadap warga sekitar, Ibu Dahlia Musnur serta anaknya. PT KPC secara paksa menyeret kedua warga tersebut keluar dari pondok dan tanah mereka, tidak hanya itu PT KPC juga menggusur 80 keluarga Komunitas Dayak Basap dari Kampung Keraitan dan mengisolasinya ke wilayah baru yang PT KPC sebut Desa Budaya, Mattirowali⁽¹⁶⁾.

Figur selanjutnya adalah (5), Erwin Aksa Sebagai salah satu wakil ketua koordinator strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Keponakan Jusuf Kalla ini, juga tercatat

sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang juga pernah menjadi Tim Satgas Omnibus Law. Rekam jejak bisnis ekstraksinya dengan Bosowa Group di Maros, yang merupakan kawasan ekosistem karst, disana operasi pabrik dan tambang semen PT Bosowa menghilangkan kampung Amessangeng Lama, dan membuat warga yang masih bertahan mengalami krisis air dan hidup berdampingan dengan debu⁽¹⁷⁾.

Dua PLTU milik Bosowa di Jeneponto menghasilkan daya rusak sosial ekologis kepada masyarakat nelayan, pembudidaya rumput laut, petambak ikan dan udang, menjadi kelompok paling terdampak abu sisa pembakaran batubara dari dua PLTU itu. Petani tanaman hortikultura, petambak garam, pedagang, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga alami hal serupa⁽¹⁸⁾.

Figur yang lain adalah (6) Pandu Sjahrir, keponakan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, pengusaha tenar sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), ia juga Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan menjabat di APINDO pada Bidang Ekonomi Digital⁽¹⁹⁾.

Pandu juga salah satu anggota satgas Omnibus Law yang kontroversial. Rekam jejak bisnis ekstraksinya terekam menggusur dan merampas tanah warga di Desa Sungai Nangka di Kutai Kartanegara, menyebabkan ruas jalan penghubung antar Kecamatan Sanga-Sanga dan Muara Jawa terputus, hingga merobohkan 6 rumah yang ada disekitarnya. Tidak hanya itu, operasi penambangan Toba Bara di Sanga-Sanga juga menyebabkan banjir di Kelurahan Jawa hingga mencemari sungai dan menyisakan sejumlah lubang tambang beracun⁽²⁰⁾.

Figur lainnya adalah (7) Erick Thohir, meskipun tidak masuk dalam jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erick menyatakan mendukung paslon Prabowo-Gibran. Menteri BUMN ini, memiliki rekam bisnis ekstraksi yang berkaitan dengan saudaranya yaitu Garibaldi Thohir yang merupakan pemilik dari PT Adaro Energy bersama dengan Sandiaga Uno. Rekam daya rusak PT Adaro Energi yang beroperasi di Kalimantan Selatan, salah satunya ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedikitnya ada empat Kecamatan yang terhubung dengan Sungai Balangan, seperti Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sei Pandan dan Kecamatan Bajang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih, karena sungai tersebut tercemar limbah PT Adaro⁽²¹⁾. Penggusuran tanah warga juga dilakukan PT Adaro, contohnya di Desa Wonorejo dan Juai, Balangan Kalimantan Selatan, warga transmigrasi dari Jawa Tengah, yang bertani karet, harus tergusur dari wilayahnya⁽²²⁾.

Dari penelusuran atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, terdapat lima figur yang terkait dengan bisnis pertambangan dan industri ekstraktif yakni;

(1) Arsjad Rasjid, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bagi paslon nomor urut 3 ini adalah juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), rekam jejak bisnis industri ekstraktifnya terekam sebagai Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk. (INDY), ia juga pernah menjadi anggota Satgas Omnibus Law.

PT Kideco Jaya Agung, salah satu anak perusahaan dari PT Indika Energi mencemari sungai Biu di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, mengakibatkan air sungai tersebut tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh warga⁽²³⁾.

Selain itu, PT Kideco Jaya Agung, merambah kawasan konservasi Tanah Merah Paser untuk pembangunan pelabuhan laut distribusi batubara tanpa izin⁽²⁴⁾. PT Kideco Jaya Agung juga

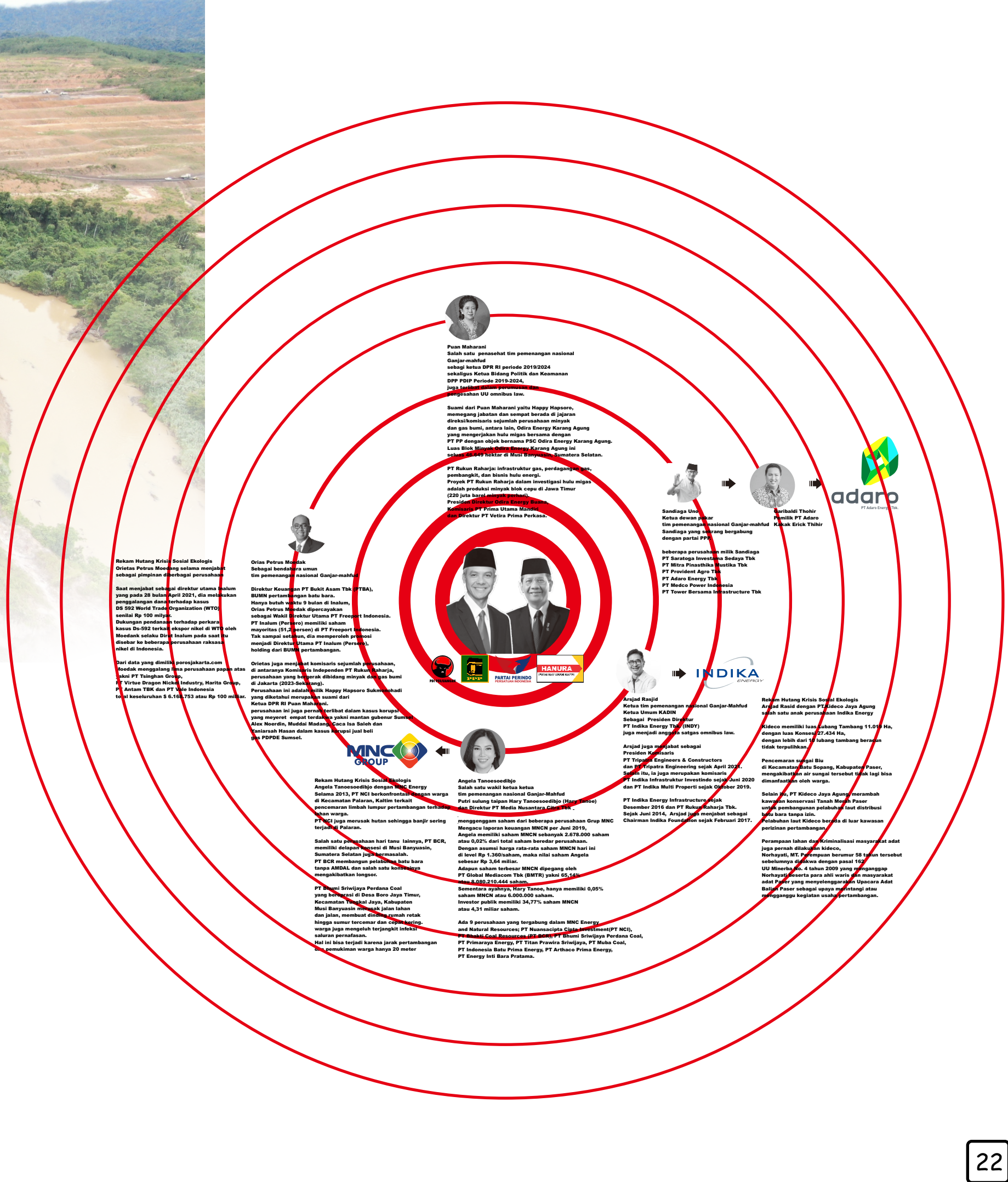


(Foto salah satu lubang tambang PT Kideco Jaya Agung yang bersebelahan dengan sungai Biau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser)

Dari data yang dimiliki porosjakarta.com Orlas Petrus Moedank menggalang lima perusahaan papan atas untuk meyumbang yakni PT Tsinghan Group, PT Virtue Dragon Nickel Industry, Harita Group, PT Antam TBK dan PT Vale Indonesia total keseluruhan \$ 6.168.753 atau Rp 100 miliar⁽²⁷⁾.

Figur yang lain adalah (4) Sandiaga Uno sebagai ketua dewan pakar tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud, Sandiaga yang sekarang bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga punya sederet rekam jejak utang sosial ekologis lewat beberapa perusahaan, PT Adaro Energy salah satunya, yang ia kuasai sejak tahun 2001 bersama dengan Garibaldi Thohir, kakak dari Erick Thohir.

Figur yang tak kalah penting adalah (5) Puan Maharani, ia salah satu penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, ia juga menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024, sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Periode 2019-2024. Puan terekam terlibat dalam perumusan dan pengesahan UU Omnibus Law yang kontroversial. Suami dari Puan Maharani yaitu Happy Hapsoro memegang jabatan dan sempat berada di jajaran direksi dan komisaris sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi, antara lain, Odira Energy Karang Agung yang mengerjakan hulu migas bersama dengan PT. PP luas Blok Minyak Odira Energy Karang Agung ini seluas 46.649 hektar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan⁽²⁸⁾.



Happy juga terkam dikaitkan dengan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo 2020-2022, lewat peran Muhammad Yusrizki Muliawan, merupakan Direktur Utama (Dirut) pada PT Basis Utama Prima (BUP) atau Basis Investment, anak buah Heppy⁽²⁹⁾.

Rekam jejak pendukung para calon presiden dan wapres di daerah

Tidak hanya figur-figur di dalam struktur tim sukses di tingkat nasional saja, namun keterkaitan para pendukung dan tim sukses di daerah juga terendus memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan industri ekstraktif, JATAM Kalimantan Timur menelusurinya dengan melakukan penelusuran rekam jejak para aktor.

Salah satu figur pada tim kemenangan yang dikenal sebagai TIMNAS pasangan calon Presiden Anies-Muhaimin di wilayah Kalimantan Timur dan memiliki rekam jejak bisnis pertambangan batubara adalah Nabil Husein, ia adalah anak dari Said Amin yang merupakan seorang pengusaha dan salah satu pimpinan ormas Pemuda Pancasila (PP) di Kalimantan Timur.

Nabil Husein sendiri dalam karir politiknya merupakan salah satu kader dari partai Nasdem, dan pada pemilu tahun ini akan maju sebagai calon legislatif DPR RI daerah pemilihan Kaltim, selain berpolitik ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan Presiden klub sepak bola di Samarinda. Ia beserta ayahnya tercatat sebagai pemilik saham sebesar 50% PT Ghani Raya Mandiri yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara. Perusahaan ini berkongsi 50% dengan Perusahaan Batubara lain yakni PT Ansaf Inti Resources⁽³⁰⁾. Perusahaan ini beroperasi di Loa Janan, Kutai Kartanegara.

Sedangkan pada pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Kalimantan Timur yang teridentifikasi terkait dengan bisnis industri ekstraktif, terdapat nama Rudy Mas'ud sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Timur. Ia merupakan Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Timur yang menjadi partai pengusung pasangan 02⁽³¹⁾.

Rudy Mas'ud terhubung dengan PT Barokah Perkasa Group, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar yang memiliki 63 kapal tanker, beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu Rudy Mas'ud juga tercatat memiliki rekam jejak dalam beberapa Perusahaan Migas dan Logistik, sepanjang 2007-2013 ia menjabat sebagai Direktur PT Barokah Bersaudara Perkasa. 2014-2015 ia menjabat sebagai Komisaris PT Cakra Buanamas Utama, kemudian pada 2015 ia menjabat Sebagai Komisaris di PT. Eissu Prima Usaha hingga 2015-2018 menjabat sebagai sebagai Direktur Utama (Dirut), PT Cakra Buanamas Utama.

Selanjutnya terdapat nama Andi Harun, Walikota Samarinda yang sekaligus juga merupakan Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur, Partai yang mengusung pasangan calon Prabowo-Gibran. Ia pernah terekam terhubung dalam industri ekstraktif, seperti pertambangan batu bara, PT Rei Energy Investama dan PT Indo Energy Kaltim. Dalam dokumen beneficial ownership dan profil perusahaan PT Indo Energy Kaltim ditemukan nama Andi Harun tercatat sebagai Komisaris, perusahaan batu bara ini terekam dengan Nomor SK IUP 545/K.269b/2010, yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat dengan luas konsesi 3.463 hektar.

Pada pendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud di Kalimantan Timur yang terkait dengan bisnis industri ekstraktif, terdapat nama Surpani Sulaiman, ia adalah ketua DPD Partai Hanura Kaltim, partainya ikut menjadi bagian pendukung dari pasangan nomor 03 bersama Partai PDIP, PPP dan Perindo. Surpani terhubung sebagai CEO pertambangan batu bara, PT SUMA Energi Investama Group⁽³²⁾ yang membawahi 3 perusahaan pertambangan batu bara, yakni CV Jaya Prima di Kecamatan Samboja, PT Jhoswa Mahakam Mineral yang berada di Kecamatan Kenohan dan Kembang Janggut serta CV Pandawa Tujuh di Kecamatan Muara Jawa.

Pendukung Ganjar-Mahfud lainnya di Kalimantan Timur adalah Edi Damansyah, ia Bupati Kutai Kartanegara dan merupakan ketua DPC Partai PDIP disana, ia pernah melontarkan gagasan dan program yang kontroversial dan berpihak pada pertambangan batu bara ilegal pada saat Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2020 lalu.

Muncul pula nama politisi seperti Mahyudin, ia adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo, partai ini pengusung Pasangan Ganjar-Mahfud. Mahyudin saat ini ia adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Kaltim di Jakarta, Mahyudin juga pernah menjabat menjadi Bupati Kutai Timur periode 2003-2005, pada masa itu ia bertanggung jawab atas diterbitkannya izin perkebunan kelapa sawit bagi PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA) yang hingga saat ini masih berkonflik dengan masyarakat adat Modang di Kecamatan Busang, Kutai Timur.

BOX II TEMALI PARA KANDIDAT & TIMSES DENGAN PROYEK HILIRISASI & TRANSISI ENERGI

Ketiga pasangan calon mulai dari Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran hingga Ganjar-Mahfud senada mengusung solusi palsu krisis iklim yang berkedok proyek hilirisasi industri dan transisi energi, misalnya program "Indonesia Menuju EBT" yang amat bersandar pada pembongkaran energi panas bumi dan menargetkan kontribusi hilirisasi Industri mencapai 22,0%-23,0% pada tahun 2029⁽³³⁾, program ini diusung oleh Paslon 01, Anies-Muhaimin.

Begitu juga Prabowo-Gibran melalui program hilirisasi produk nikel yang akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga hingga timah⁽³⁴⁾, pasangan Paslon 02 ini, juga berambisi menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables)⁽³⁵⁾

Sementara Paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, juga masih meletakkan hilirisasi sumber daya alam dan pertambangan mineral yang diklaim sebagai keunggulan komparatif Indonesia, pasangan ini mengumbar komitmen mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi⁽³⁶⁾ seperti keinginan mereka untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Karena hal-hal di atas tersebut maka, ketiga pasangan calon akan terus meletakkan Indonesia dalam jebakan lingkaran setan ekonomi dan industri ekstraktif yang berdaya rusak tinggi, tidak hanya termaktub dalam dokumen janji, visi-misi mereka, namun para tim kampanye dan tim sukses disekitar ketiga pasangan calon ini juga terekam memiliki kaitan dan rekam jejak hitam yang menunjukkan mereka terhubung dengan proyek-proyek solusi Palsu Iklim berupa Hilirisasi Industri dan Transisi energi.



Foto pembangunan kawasan industri KIPI/KIHI dan Ikan Layang tangkapan nelayan di Tanah Kuning, Bulungan, Kalimantan Utara

Mereka juga ditengarai sebagai pihak yang akan mendapatkan untung dari gelombang program dan proyek Hilirisasi Industri dan Transisi energi di Indonesia, diantaranya adalah;

Pandu Sjahrir dan Arsjad Rasjid

Pandu Sjahrir menjabat sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, sedangkan Arsjad Rasjid menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar-Mahfud. Pandu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Toba Bara Sejahtera, ia juga adalah keponakan Luhut Panjaitan, meskipun berbeda jagoan, ia dan Arsjad Rasjid terhubung dengan bersama-sama berinvestasi dan berbisnis dengan ekosistem kendaraan listrik dari Taiwan, Gogoro Inc. Arsjad Rasjid sebagai direktur utama Indika Energy menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Industri Baterai Indonesia (IBC), Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn), dan Gogoro Inc. (Gogoro), yang kesemuanya juga terhubung dengan bisnis baterai dan kendaraan Listrik⁽³⁷⁾.

PT Toba Bara Energi (TBAE) milik Pandu, juga memperluas portofolio bisnis di sektor kelistrikan dengan mengakuisisi 49% saham PT Adimitra Energi Hidro (AEH) yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air, serta mengakuisisi PT Bayu Alam Sejahtera (BAS) yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. AEH pada tahun 2017 ditetapkan oleh PLN sebagai calon pengembang proyek Pembangkit Tenaga Listrik Minihidro (PLTM) 2x3MW yang terletak di Sungai Way Besay, Kecamatan

Sumber Jaya, Provinsi Lampung. AEH telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PLN pada 22 Februari 2021 yang mulai berlaku efektif pada 22 Maret 2021⁽³⁸⁾.

Keluarga Thohir dan Sandiaga Uno

Erick Thohir yang sudah bersahabat lama dengan Sandiaga Uno, memang berbeda kubu dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, Erick adalah pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, namun relasi bisnis ekstraksi kakak dari Erick Thohir, yakni Garibaldi Thohir berkaitan erat dengan Sandiaga Uno.

Adaro energy yang dioperasikan oleh kakak dari Erick Thohir yakni Garibaldi Thohir sebagai Presiden Direktur dan sahamnya yang terhubung dengan Sandiaga Uno ini, juga akan memperluas bisnis mereka di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI/KIHI) di Kalimantan Utara yang juga akan terhubung dengan Proyek raksasa PLTA Sungai Kayan dan Sungai Mentarang, kesemuanya akan menggusur ruang hidup warga dan merusak lingkungan⁽³⁹⁾. Selain itu Adaro juga terkait dengan banyak proyek transisi energi dan energi baru terbarukan lainnya seperti proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) atau tenaga angin di Tanah Laut, Kalimantan Selatan hingga proyek Solar Photovoltaic (PV) dan baterai listrik bekerjasama dengan aktor luar negeri⁽⁴⁰⁾.

Erwin Aksa dan Jusuf Kalla

Erwin Aksa menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Koordinator TKN, Prabowo-Gibran, ia juga Komisaris Utama di PT Bosowa Group. Erwin juga merupakan keponakan dari Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Direktur utama Grup Usaha PT. Hadji Kalla, berbeda dengan keponakannya itu, Jusuf Kalla justru memilih mendukung Pasangan Anies-Muhaimin.

Bosowa dan Kalla Group sama-sama akan memperluas bisnisnya yang berkedok transisi energi. Kalla Group melalui Malea Energy dan Poso Energy beroperasi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan⁽⁴¹⁾, dan Sulewana, Poso, Sulawesi Tengah. Kalla Group juga akan membangun Slemter berkapasitas 33.000 metrik ton pertahun, yang akan beroperasi di Desa Karang-Karangan dan Desa Bukit Harapan di Kecamatan Bua, Kabupaten Lawu, Sulawesi Selatan. Kalla Group melalui perusahaan layanan logistik, Kalla Lines mulai juga menggarap transportasi pengangkutan material untuk nikel⁽⁴²⁾.

Sedangkan Bosowa mengendalikan tambang nikel di Konawe dan smelter nikel yang akan dibangun di Jeneponto. Smelter nikel tersebut akan pasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto yang berkapasitas 2x125 MW untuk menghasilkan feronikel yang akan diekspor 100% ke China, India, dan Jepang⁽⁴³⁾.

Hubungan keluarga pebisnis yang berpolitik ini juga berpotensi terjadinya nepotisme dalam politik elektoral, bahkan Jusuf Kalla menipiskan sejumlah nama caleg dari partai Golkar kepada Erwin⁽⁴⁴⁾.

Aburizal Bakrie

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) lewat anak perusahaannya, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin juga akan memperluas daya rusaknya dengan menggandeng perusahaan asal China, Ithaca Group dan Air Product untuk proyek gasifikasi batu bara. bergabungnya mitra asal China, maka proyek hilirisasi batu bara yang dikerjakan anak usaha yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia berubah menjadi amonia. Sebelumnya kedua anak usaha ini berencana mengembangkan produk hilirisasi batu bara menjadi methanol, perubahan produk hilirisasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya yakni pasar⁽⁴⁵⁾.

KESIMPULAN & SERUAN

Setiap rezim hasil Pemilu yang bernaung di bawah hegemoni pelaku pasar bebas nampak akan terus setia pada paradigma pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada industri ekstraktif, cara mereka memelihara kuasa dan hak-hak istimewa mereka adalah dengan mengendalikan cara berpikir khalayak luas bahwa Pemilu adalah solusi dan jalan keluar. Namun yang penting disorot bukan hal-hal yang diperdebatkan terbuka, tetapi justru hal-hal yang tidak lagi diperdebatkan karena sudah diterima sebagai keniscayaan yakni kesetiaan ketiga pasangan calon peserta Pemilu 2024 kepada instrumen ekonomi pertumbuhan dan ekstraktivisme.

Jika sudah begitu apakah ritual demokrasi seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres akan menghindarkan rakyat dari penyusutan ruang dan degradasi kualitas hidup, dehumanisasi, rontoknya tata produksi dan konsumsi hingga konflik dan lenyapnya generasi ?

Kesadaran kritis rakyat juga harus dibangkitkan untuk menghargai apa yang saat ini sudah dikuasai dan dimiliki, karena itu adalah alas dan kapital organik setempat yang harus digunakan untuk mewujudkan jejaring produksi dan konsumsi yang berdaya-pulih. Karena rakyat tidak dapat lagi berharap bahwa negara akan menjamin keselamatan mereka. Rakyat sendiri yang mampu menentukan apakah mereka akan selamat atau harus menyingkir dari ruang hidup mereka.

Karena Pemilu hanya akan kembali menjadi kesempatan menumpuk tunggakan utang-utang sosial ekologis rezim penyelenggara negara yang tak pernah dilunasi, bahkan ditumpuk dengan utang-utang baru, dari uraian sebelumnya bahkan juga terlihat ketidakpedulian para kandidat terhadap utang-utang sosial ekologis dan lebih fokus membodohi para calon pemilih dengan janji-janji manis yang terbukti bangkrut karena terus bersandar pada target pertumbuhan ekonomi dan paradigma ekonomi menetes.



Daftar Rujukan

(1) <https://nasional.tempo.co/read/1665934/jadi-tersangka-kasus-tambang-legal-ini-peran-ismail-bolong-dan-dua-orang-lainnya>

(2) <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/16045831/perjalanan-kasus-ismail-bolong-sempat-singgung-kabareskrim-hingga-kini-jadi?page=all>

(3) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/08/kapolri-lakukan-mutasi-besar-besaran-dinilai-tidak-terkait-pemilu>

(4) <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/menebak-konglomerat-di-belakang-anies/>

(5) <https://www.jatam.org/oligarki-tambang-di-balik-pemilu-2019/>

(6) <https://www.mongabay.co.id/2019/02/21/potret-relasi-pebisnis-tambang-di-balik-kedua-calon-presiden>

(7) https://www.kompasian.com/wawanperiawan/6200f9fa87000029502646b3/ada-praktik-ilegal-dalam-lingkup-perusahaan-nikel-di-sulawesi-tengah?page=3&page_images=1
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/165149/izin-tambang-nikel>
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/165097/ahmad-ali-tambang-nikel>
<https://www.jatam.org/potret-krisis-dan-rekam-jejak-kandidat-tim-kampanye-pilkada-sulteng/>

(8) <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6972696/warga-tana-toraja-ancam-polisikan-pt-malea-usai-diduga-serobot-tanah-adat>

(9) https://beritakotamakassar.fajar.co.id/2023/01/10/format-sorot-pt-malea-dinilai-gagal-kelola-lingkungan-hidup/#google_vignette

(10) <https://www.walhi.or.id/perusahaan-kalla-group-menenggelmkan-lahan-pertanian-masyarakat-pesisir-danau-poso>
<https://variaadvokat.com/390/dugaan-pelanggaran-ham-pt-poso-energy-terhadap-masyarakat-pamona-sulawesi-tengah.html>

(11) <https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/>
<https://nasional.tempo.co/read/1179546/jalan-panjang-nasib-karyawan-kertas-nusantara>
<https://www.watchindonesia.de/12884/zellstoffwerk-kiani-kertas?lang=ID>

(12) <https://tirto.id/daftar-bisnis-gibran-gRpN>

(13) <https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-buat-siapa/>
<https://www.jatam.org/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/>
<https://www.jatam.org/nyapu/>
<https://tirto.id/jejak-bisnis-angkatan-darat-dan-adik-prabowo-di-penajam-paser-utara-ehe7>
<https://www.walhi.or.id/hentikan-intimidasi-kembalikan-tanah-masyarakat-desa-telemow>

(14) <https://betahita.id/news/lipsus/6606/jatam-gugat-menteri-esdm-soal-informasi-5-perusahaan-tambang.html?v=1639459684>
<https://www.liputan6.com/regional/read/5075255/dugaan-ekspor-ilegal-batubara-dpr-bakal-panggil-pt-mhu>
<https://bisnisnews.com/mafia-judi-online-303-dan-mantan-narapidana-kasus-korupsi-diduga-kuasai-konsesi-tambang-pt-mhu/>
<https://koranpelita.com/2022/11/08/testimoni-ismail-bolong-diduga-untuk-tutupi-kasus-korupsi-kakap-dan-judi-online-303-kaisar-sambo-yang-rugikan-negara-rp-93-triliun/>
<https://sintesanews.id/berita-utama/rampas-lahan-warga/>
<https://www.jatam.org/breaking-news-obral-kekerasan-premanisme-di-tambang-batubara-pt-mhu-kaltim/>
<https://indcyber.com/komnas-ham-ri-sidak-pt-mhu-terkait-pencemaran-lingkungan-hidup/>

(15) <https://money.kompas.com/read/2022/06/15/201907726/sederet-kontroversi-zulkifli-hasan-saat-jadi-menteri-kehutanan-era-sby?page=all>

(16) <https://betahita.id/news/lipsus/6606/jatam-gugat-menteri-esdm-soal-informasi-5-perusahaan-tambang.html?v=1639459684>
<https://www.jatam.org/batubara-mematikan-pt-kpc-bumi-resources/>
<https://www.jatam.org/kpc-pelaku-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-warga/>
<https://kaltimtoday.co/terkait-pencemaran-ini-tanggungjawab-pt-kpc-ke-lingkungan>
<https://nasional.kontan.co.id/news/aktivis-lingkungan-menolak-perpajakan-kontrak-kpc-berikut-alasannya>
<https://regional.kompas.com/read/2015/01/16/17005751/Limbah.PT.Kaltim.Prima.Coal.Cemari.Sungai.Sangatta>
<https://media.neliti.com/media/publications/35389-ID-sifat-melawan-hukum-dalam-korupsi-divestasi-saham-pt-kpc-dengan-ri.pdf>
<https://antikorupsi.org/id/article/tunggak-pajak-polri-cekal-petinggi-kaltim-prima-coal>
<https://nasional.tempo.co/read/1573451/banjir-di-sangatta-jatam-minta-izin-pt-kaltim-prima-coal-dievaluasi>
<https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>

(17) <https://www.mongabay.co.id/2019/06/01/nasib-warga-yang-hidup-di-sekitar-tambang-dan-pabrik-semen-di-maros/>

(18) <https://www.mongabay.co.id/2023/07/03/menyoal-daya-rusak-pltu-batubara-pada-fasilitas-industri-apa-temuan-aliansi/>

(19) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231113190702-92-1023702/deret-pengusaha-di-balik-anies-ganjar-dan-prabowo-di-pilpres-2024/2>

(20) <https://www.jatam.org/kembalikan-tanah-yang-dirampas-oleh-pt-perkebunan-kaltim-utama-i-toba-sejahtera-group-milik-luhut-binsar-panjaitan-menko-bidang-kemaritiman-kepada-petani/>
<https://www.niaga.asia/polisi-ambil-sampel-dugaan-pencemaran-sungai-nangka-oleh-pt-kutai-energi/>

(21) <https://nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai>

(22) <https://projectmultatuli.org/warga-transmigran-merajut-ulang-mimpi-setelah-terusir-dari-desa-adaro/>

(23) <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-kideco-akui-cemari-lingkungan>

(24) <https://nasional.tempo.co/read/205887/polisi-periksa-perusahaan-tambang-kideco>

(25) <https://www.jatam.org/ritual-adat-dipolisikan-kideco-warga-paser-berontak/>

(26) <https://www.jatam.org/oligarki-tambang-di-balik-pemilu-2019/>

(27) <https://www.porosjakarta.com/sosok/061654750/profil-orias-petrus-moedak-atau-rudy-moedak-penggalang-dana-rp-100-m-untuk-lawyer-wto>

(28) <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>

(29) <https://news.republika.co.id/berita/rwxpgo436/ini-peran-direktur-perusahaan-milik-suami-puan-di-kasus-bts-berdasar-dakwaan-johnny-plate>

(30) <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>

(31) <https://news.republika.co.id/berita/rwxpgo436/ini-peran-direktur-perusahaan-milik-suami-puan-di-kasus-bts-berdasar-dakwaan-johnny-plate>

(32) <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/3832> diakses pada 18 Januari 2024

(33) Visi, Misi & Program Anies-Muhaimin, Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Hal 32

(34) Visi, Misi & Program Prabowo-Gibran, Hal 37

(35) Ibid, Hal 45

(36) Visi, Misi Ganjar-Mahfud, Menuju Indonesia Unggul, Hal 33

(37) <https://market.bisnis.com/read/20220123/192/1492243/indika-indy-dan-tbs-energi-toba-ekspansi-bisnis-kendaraan-listrik-sahamnya-ikut-tersetrum>

(38) <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230711210519-128-453418/kurangi-batu-bara-fokus-ev-saham-toba-menarik-dikoleksi>

(39) <https://jatamkaltim.org/laporan/kebohongan-hijau-potret-ancaman-daya-rusak-oligarki-dan-keselamatan-rakyat-pada-tapak-proyek-kawasan-industri-hijau-di-kalimantan-utara>

(40) <https://market.bisnis.com/read/20231128/192/1718919/update-adaro-adro-soal-plta-terbesar-1375-mw-investasi-rp40-triliun>

(41) <https://www.innalar.com/regional/36710214723/smelter-nikel-berkapasitas-33000-metrik-ton-di-sulawesi-selatan-ini-ternyata-dibangun-mantan-wapres-ri?page=1>

(42) <https://market.bisnis.com/read/20230725/192/1678148/kalla-group-investasikan-rp150-miliar-ke-bisnis-pengangkutan-nikel>

(43) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140420/257/220747/smelter-nikel-bosowa-lakukan-ground-breaking-pertengahan-tahun-ini>

(44) <https://news.detik.com/pemilu/d-7099846/erwin-aksa-sebut-jk-titip-nama-caleg-meski-beda-dukungan-di-pilpres>

(45) <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231206133410-17-494990/garap-hilirisasi-bumi-resources--bumi--gandeng-pemodal-china>



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
KALIMANTAN TIMUR